

ABSTRAK

Pemerintahan memiliki kewenangnya masing masing. Dalam mengurus daerah otonom Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan seperti urusan dalam tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan Perhubungan. Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan urusan Pemerintahan mengenai urusan Perhubungan sangat penting terkhusus bagi daerah yang padat penduduk. Sehingga Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kewajibannya dalam urusan perhubungan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat jalan umum. Termasuk dalam aktivitas masyarakat di daerah perlintasan sebidang kereta api yang tersebar di setiap daerah. Banyak perlintasan sebidang yang masih belum berpalang pintu di kota ataupun desa, dalam memfasilitasi pengolaan palang pintu kereta api ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang sudah dicantumkan diatas pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus perhubungan. Penyebab dari banyaknya kasus di perlintasan sebidang disebabkan oleh kurangnya penyediaan palang pintu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keewenangan pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan dalam menyediakan palang pintu kereta api yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pengguna jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan terkait penyediaan palang pintu kereta api. Yang dimana pemerintah daerah mengharuskan membuat kebijakan daerah mengenai penyediaan palang pintu ini yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Kewenangan, Palang Pintu Kereta Api

ABSTRACT

Governments have their respective authorities. In managing autonomous regions, the Regional Government has obligations that must be implemented, such as matters regarding labor, women's empowerment and child protection, food, land, the environment, population administration and civil registration, community and village empowerment, population control and family planning, archives, communications, and informatics, cooperatives, small and medium businesses, investment, youth and sports, statistics, coding, culture, libraries and communications. Regional Government in resolving Government affairs regarding Transportation matters is very important, especially for densely populated areas. So that the Regional Government is obliged to carry out its obligations in transportation matters related to the protection of public roads. This includes community activities in railroad crossing areas spread across each region. Many level crossings still do not have gates in cities or villages. Facilitating the management of these railway gates is the responsibility of the Regional Government. As stated above, the Regional Government has the authority to manage communications. The cause of the large number of cases at level crossings is due to the lack of provision of doorstops.

This research aims to determine the government's authority to overcome the legal vacuum in legislation in providing train doorstops which aims to protect the public who use the road. The type of research used is normative legal research. The problem approaches used in this research are the Statute Approach and the Case Approach.

The results of this research indicate that there is a legal vacuum in the legislation related to the provision of train doorstops. Where the regional government is required to make a regional policy regarding the provision of this doorstop as stated in Article 17 paragraph (1) of the Regional Government Law which states that the Region has the right to determine Regional policy to carry out government affairs which are the authority of the Region

Keywords: Legal Vacuum, Authority, Railway Doorstop